

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Hasil Penelitian

IV.1.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap BUMN dan swasta yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini untuk menghasilkan sampel yang memenuhi kriteria adalah metode *purposive sampling*. Sampel yang memenuhi kriteria-kriteria dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 1. Sampel Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Jumlah		Total
	2017	2018	
Panel A: Sampel Berdasarkan Skandal			
Perusahaan BUMN yang diidentifikasi memiliki skandal	17	16	33
Perusahaan swasta yang diidentifikasi memiliki skandal	10	8	18
Perusahaan BUMN yang diidentifikasi tidak memiliki skandal	3	4	7
Perusahaan swasta yang diidentifikasi tidak memiliki skandal	20	22	42
Jumlah sampel	50	50	100
Panel B: Sampel Berdasarkan Restatement			
Perusahaan BUMN yang melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	5	7	12
Perusahaan swasta yang melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	15	5	20
Perusahaan BUMN yang tidak melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	15	13	18
Perusahaan swasta yang tidak melakukan <i>restatement</i> laporan keuangan	15	25	40
Jumlah sampel	50	50	100

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh 100 sampel yang terdiri dari 50 perusahaan yang memiliki data lengkap dari tahun 2017 hingga 2018 untuk digunakan pada penelitian ini. Entitas yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.

IV.1.2. Deskripsi Data Penelitian

Laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan/annual report yang dipublikasi pada *website* Bursa Efek Indonesia ataupun secara langsung melalui situs resmi perusahaan terkait merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Ojek penelitian ini ialah 20 Badan Usaha Milik Negara dan 30 perusahaan swasta selama periode 2017 hingga 2018 yang digunakan untuk mengukur variable hubungan politik pada perusahaan tersebut dan variable manajemen skandal dengan *return on asset*, *book to market*, dan *firm size*, sector dan tahun sebagai variable kontrolnya.

Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil uji hipotesis penelitian, maka seluruh data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini harus melakukan uji asumsi klasik. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui apakah model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah model terbaik dan telah memenuhi semua asumsi yang ada.

IV.1.3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini adalah untuk memperoleh gambaran, mengatur dan juga menyimpulkan kriteria utama dari data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Informasi yang digunakan untuk memberikan gambaran sampel berupa jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata data (*mean*) dan standard deviasi. Berikut merupakan hasil dari uji statistik deskriptif menggunakan aplikasi olah data STATA *version* 16:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Max	Min	Mean	Std. Deviation
Panel A – Data Nominal					
ROA	100	0,2585	-20,0304	-0,3858	2,7448
BTM	100	181,0088	-6,3786	4,4043	23,4877
FMSIZE	100	34,7988	24,7440	30,1890	1,9912
Panel B – Data Dummy					
	Proporsi Dummy = 0			Proporsi Dummy = 1	
	Obs.	%		Obs.	%
SKANDAL	49	49		51	51
REST	68	68		32	32
POLICON	60	60		40	40
S1	92	92		8	8

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

S2	84	84	16	16
S3	90	90	10	10
S4	92	92	8	8
S5	90	90	10	10
S6	86	86	14	14
S7	88	88	12	12
S8	88	88	14	14
Y1	50	50	50	50

Catatan:

ROA = total net income dibagi dengan total aset; BTM = rasio sebagai parameter menghitung ukuran kinerja suatu institusi melalui harga pasarnya; FMSIZE = logaritma ukuran perusahaan; SKANDAL = variable dummy bernilai 1 jika memiliki skandal dimedia pada tahun sekarang, bernilai 0 jika sebaliknya; REST = variable dummy bernilai 1 jika melakukan penyajian ulang laporan keuangan, bernilai 0 jika sebaliknya; POLICON = variable dummy bernilai 1 jika merupakan BUMN, bernilai 0 jika sebaliknya; S1 = Sektor Pertanian; S2 = Sektor Pertambangan; S3 = Sektor Industri Dasar Dan Kimia; S4 = Sektor Aneka Industri; S5 = Sektor Industri Barang Konsumsi; S6 = Sektor Properti; S7= Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi; S8 = Sektor Keuangan; Y1 = Tahun Kontrol 2017

Sumber: Data Diolah (2020)

Dalam penelitian ini, manajemen skandal diukur dengan REST dan SKANDAL. Dari hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai nol (0) dari REST adalah perusahaan yang tidak melakukan penyajian ulang laporan keuangannya salah satunya adalah perusahaan First Media Tbk (KBLV) tahun 2018. Sedangkan nilai satu (1) diberikan kepada perusahaan yang melakukan penyajian ulang laporan keuangan ya, salah satunya Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2017.

Untuk pengukuran dengan SKANDAL, nilai satu (1) di berikan kepada perusahaan yang di identifikasi melakukan skandal, salah satunya adalah PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) pada tahun 2017, yaitu berupa dugaan korupsi penjualan tanah milik negara di Kalimantan Raya, Tambun, Bekasi oleh PT Adhi Karya (Persero) kepada pengusaha Hiu Kok Ming. Dan nilai nol (0) merupakan perusahaan yang teridentifikasi tidak melakukan skandal dalam perusahaan nya. Salah satu perusahaan yang tidak melakukan skandal pada tahun 2018 adalah PT. Aneka Gas Industri Tbk. (AGII).

Variabel bebas pada penelitian ini adalah koneksi politik (*political connection*) memiliki dua nilai, yaitu nol (0) dan satu (1). Nilai nol (0) pada variabel POLICON diberikan kepada 20 perusahaan sampel yang tidak memiliki hubungan politik melalui kepemilikan pemerintah (BUMN), sedangkan nilai satu (1) merupakan 30 perusahaan sampel yang memiliki hubungan politik melalui

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

kepemilikan pemerintah (swasta). Tingkat koneksi politik di entitas yang menjadi sampel penelitian memiliki rata-rata sebesar 0,40 dan *standard deviation* sebesar 0,4924. Artinya terdapat 40% perusahaan yang memiliki koneksi politik dari 100% perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Pada variable kontrol *return on asset*, nilai terendah dari ROA dalam penelitian ini sebesar -20.0304 yang dimiliki oleh Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) pada tahun 2018 yang artinya terdapat 20 perusahaan yang performa keuangannya mengalami penurunan, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,2585 yang dimiliki oleh perusahaan Lippo Cikarang Tbk (LPCK) pada tahun 2018. Nilai rata-rata ROA pada penelitian ini adalah sebesar -0,3858 yang berarti rata-rata *return on asset* perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi sampel penelitian ini adalah -0,3858 dan *standard deviation* nya sebesar 2,7448 yang berarti data *return on asset* menyimpang sebesar 2,7448 dari rata-ratanya sebesar -0,3858.

Pada variabel kontrol *book-to-market*, nilai terendah dari BTM dalam penelitian ini sebesar -6,3786 yang dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 181,0088 yang dimiliki oleh perusahaan Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) pada tahun 2018. Nilai rata-rata BTM pada penelitian ini adalah sebesar 4,4043 yang berarti rata-rata *book-to-market* perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi sampel penelitian ini adalah 4,4043 dan *standard deviation* nya sebesar 23,4877 yang berarti data *book-to-market* menyimpang sebesar 23,4877 dari rata-ratanya sebesar 4,4043.

Pada variable kontrol ukuran perusahaan (*firm size*), nilai terendah dari FMSIZE dalam penelitian ini sebesar 24,7440 yang dimiliki oleh Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 34,7988 yang dimiliki oleh perusahaan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada tahun 2018. Nilai rata-rata FMSIZE pada penelitian ini adalah sebesar 30,1890 yang berarti rata-rata ukuran perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi sampel penelitian ini adalah 30,1890 dan *standard deviation* nya sebesar 23,4877 yang berarti data ukuran perusahaan menyimpang sebesar 23,4877 dari rata-ratanya sebesar 30,1890.

IV.1.4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel yang disajikan dapat digunakan dalam model penelitian yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas terhadap variable adalah menggunakan uji *Skewness-Kurtosis*.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hanya FMSIZE berdistribusi normal dengan uji S-K yang melebihi 0,005, yaitu 0,5727. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada lampiran 4. Penelitian ini menghindari penghapusan data-data *layer* untuk menjaga agar data yang diolah adalah data yang mencerminkan informasi-informasi yang sesungguhnya dari data yang telah dikumpulkan. Peneliti sudah melakukan treatment terhadap data untuk membuat data menjadi normal. Maka, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan asumsi *Central Limit Theorem* yang menyatakan pengambilan data yang semakin banyak dari populasi yang ada maka sampel tersebut akan terdistribusi normal. Gujarati dalam penelitian Nugrahanti & Puspitasari (2016) menyatakan bahwa harus $n \geq 30$ jumlah sampel dalam penelitian agar sampel tersebut dapat dianggap normal.

Hasil ini merujuk pada penelitian (Nugrahanti & Puspitasari, 2016) yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian tersebut tidak normal dengan nilai signifikansi lebih kecil dari pada α ($\alpha = 5\%$) yaitu 0,0039 dan melakukan hal yang sama yaitu menggunakan asumsi *Central Limit Theorem*.

IV.1.5. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Pairwise Colleration</i>						<i>VIF</i>	<i>Tolerance Level (1/VIF)</i>
	<i>REST</i>	<i>SKANDAL</i>	<i>POLICON</i>	<i>ROA</i>	<i>BTM</i>	<i>FMSIZE</i>		
REST	1.0000							
SKANDAL	-0.0137	1.0000						
POLICON	-0.0350	0.5145*	1.0000				1.31	0.596955
ROA	0.0856	-0.0032	-0.1634	1.0000			1.31	0.764055
BTM	0.0432	-0.1468	-0.1308	0.0309	1.0000		3.00	0.333614
FMSIZE	0.0742	0.3803*	0.4940*	0.3970*	-0.0169	1.0000	2.19	0.455647
Mean VIF = 2.18								
Catatan :								
Deskripsi variable sama seperti sebelumnya								

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan data tabel diatas dapat diperoleh bahwa adanya korelasi antara POLICON dan SKANDAL ($0.5145 > 0.05$) dan terdapat hubungan antara FMSIZE dan SKANDAL ($0.3803 > 0.05$). Korelasi yang terjadi antara POLICON dan SKANDAL dapat mengidentifikasi bahwa adanya korelasi antara entitas yang terkoneksi politik dengan peningkatan terjadinya skandal perusahaan tersebut. Karena adanya indikasi seringnya terjadi penyelewengan hak manajemen perusahaan yang terkoneksi politik dalam hal ini BUMN untuk menjalankan perusahaan secara bebas, hal tersebut merupakan akibat dari banyaknya pimpinan BUMN ditunjuk berdasarkan kedekatan politik sehingga pimpinan tersebut tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan (Andrés et al., 2011). Akan tetapi pengujiannya belum mempertimbangkan variable lainnya, oleh karena itu peneliti masih akan melakukan analisis lanjut di analisis regresi.

Korelasi yang terdapat antara FMSIZE dan SKANDAL menggambarkan bahwa perusahaan yang ukurannya semakin besar akan meningkatkan terjadinya skandal perusahaan tersebut, karna semakin besarnya ukuran perusahaan maka transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut akan semakin kompleks dan memberi peluang pada perusahaan untuk mengambil keuntungan dari celah-celah atau kelemahan yang terdapat ketentuan undang-undang untuk melakukan tindakan yang memicu terjadinya skandal seperti tindakan dalam menghindari pajak untuk setiap transaksinya.

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah VIF dan Tolerance level. Hasil yang menunjukkan nilai *tolerance level* ($1/VIF$) diatas 0,1 ($>0,1$) dan nilai VIF dibawah 10 (<10). Hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak adanya ditemukan masalah multikolinearitas pada penelitian tersebut. VIF setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini kurang dari angka 10 yaitu 1,00 sampai dengan 3,00 dan nilai *tolerance* mendekati angka 1, yaitu 0,334 sampai dengan 0,999. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi ini tidak menunjukkan problem multikolinearitas sehingga dapat dikatakan model regresi layak untuk digunakan.

IV.2. Uji Hipotesis dan Model Regresi

IV.2.1. Uji Model Regresi

Setelah melakukan beberapa uji asumsi klasik, selanjutnya adalah mengolah data menjadi model regresi yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan *Quantitative Response Model (QRM)* dengan model regresi Logit sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan model ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variable independent terhadap variable dependen penelitian ini.

Tabel 4. Analisis Regresi

n = 100	Restatement		Skandal	
	Coeff. (Std. Error)	z	Coeff. (Std. Error)	z
Cons.	(-3,3382)	-0,59	(-6,9095)	-1,09
POLICON	-0,2305 (0,6241)	-0,37	2,3089*** (0,7244)	3,19
ROA	0,0950 (0,2022)	0,47	-0,0141 (0,1050)	-0,13
BTM	-0,0013 (0,0100)	-0,13	-0,0252 (0,0343)	-0,73
FMSIZE	0,0838 (0,1940)	0,43	0,1961 (0,2168)	0,90
S1	0,4895 (1,1316)	0,43	0,8662 (1,1790)	0,73
S2	-0,4258 (1,0015)	-0,43	-0,5602 (1,1325)	-0,49
S3	0,0822 (1,0199)	0,08	-0,5882 (1,1656)	-0,50
S4	-1,4172 (1,3192)	-1,07	0,1433 (1,1740)	0,12
S5	-0,2640 (1,0440)	-0,25	0,1078 (1,1190)	0,10
S6	-0,1479 (1,0078)	-0,15	1,1088 (1,1526)	0,96
S7	-0,2861 (1,0448)	-0,27	0,4614 (1,1501)	0,40
S8	-0,5632	-0,52	-0,4536	-0,37

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

	(1,0908)		(1,2280)	
Y1	0,7924*	1,76	0,3721	0,75
	(0,4506)		(0,4944)	
Prob > chi2	0,8565		0,0003	
Pseudo R ²	0,0622		0,2761	
Catatan :				
Deskripsi variable sama seperti sebelumnya.				
*** signifikan pada 1%; ** signifikan pada 5%; * signifikan pada 10%				

Sumber:

Data Diolah (2020)

IV.2.2. Uji Likelihood Ratio

Likelihood Ratio (LR) adalah uji yang menggantikan uji F-Stat yang berfungsi untuk menguji apakah semua *slope* koefisien regresi variable independen secara bersama-sama memengaruhi variable dependennya. Pada tabel output diatas dapat dilihat bahwa pada pengujian dengan variabel *restatement* dengan hasil uji P Value sebesar 95%. P value Statistik adalah 0, 8565 sehingga H0 diterima, yang artinya adalah variable secara serentak tidak mempengaruhi terjadinya Manajemen Skandal. Sedangkan pada pengujian dengan variabel skandal dengan tingkat keyakinan (probabilitas) sebesar 95%. Probabilitas LR Statistik adalah 0,0003 sehingga H0 ditolak, yang artinya adalah variable secara serentak variabel cenderung mempengaruhi terjadinya Manajemen Skandal.

Iteration pertama atau disebut model Iteration “null” atau “kosong”, yaitu model tanpa prediksi. Pada *iteration* berikutnya maka akan dimasukkan prediksi. Pada setiap iteration kemungkinan log akan meningkat karena memiliki tujuan memaksimalkan log dan mengukur spesifik model. Ketika perbedaan iteration berurutan sudah sangat kecil maka model dikatakan menyatu dan iterasi dihentikan dan hasilnya akan ditampilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *iteration* pada pengujian dengan variabel *restatement* adalah iteration ke-lima dengan hasil log *likelihood* sebesar -58,78801. *Iteration* pada pengujian variabel skandal adalah iteration ke-lima dengan nilai sebesar -50,165447. Nilai *iteration* tersebut tidak memiliki arti dalam jika diartikan sendiri tetapi dapat membantu membandingkan model.

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

IV.2.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut tabel diatas, hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada pengujian dengan variabel *restatement* menunjukkan nilai dari *pseudo* R^2 yaitu sebesar 0.0622 dengan probabilitas 0,8565. Hal tersebut berarti koneksi politik, *return on asset*, *book-to-market*, *firm size*, sektor, dan tahun dapat menjelaskan manajemen skandal sebesar 6,22%. Sedangkan sisanya yaitu 93.78% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pada uji *R square* pada pengujian dengan skandal menunjukkan nilai dari *pseudo* R^2 yaitu 0.2761 dengan probabilitas 0.0003. Hal tersebut berarti terdapat hubungan antara koneksi politik, *return on asset*, *book-to-market*, *firm size*, sektor, dan tahun dengan skandal manajemen sebesar 27,61%. Sedangkan sisanya yang sebesar 72,39% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

IV.2.4. Uji Regresi Berganda

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen yaitu koneksi politik, *return on asset*, *book-to-market* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen skandal sebagai variabel dependen. Dibawah ini merupakan model hasil yang diperoleh dari perhitungan antara variabel dependen dan independent tersebut dengan proksi skandal perusahaan:

$$\begin{aligned} \text{SKANDAL} = & -6,9095 + 2,3089 \text{ POLICON} - 0,0141 \text{ ROA} - 0,0252 \text{ BTM} + \\ & 0,1961 \text{ FMSIZE} + 0,8662 \text{ S1} - 0,5602 \text{ S2} - 0,5882 \text{ S3} + \\ & 0,1433 \text{ S4} + 0,1078 \text{ S5} + 1,1088 \text{ S6} + 0,4614 \text{ S7} - 0,4536 \text{ S8} + \\ & 0,3721 \text{ Y1} \end{aligned}$$

Berdasarkan model diatas dapat diketahui bahwa manajemen skandal (SKANDAL) memiliki konstanta sebesar 6,9095 dan bertanda *negative*. Hal tersebut mengungkapkkan bahwa jika variabel lain yaitu koneksi politik serta variabel kontrol

yaitu *return on asset*, *book-to-market*, ukuran perusahaan, industrial dan tahun bernilai konstan, maka manajemen skandal (SKANDAL) akan berkurang sebesar 6,9095.

Koneksi Politik (POLICON) memiliki berpengaruh positif terhadap SKANDAL. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel koneksi politik (POLICON) sebesar 2,3089 dan bertanda positif. Hal tersebut mengungkapkan adanya pengaruh positif terhadap skandal yaitu jika suatu perusahaan memiliki hubungan terhadap politik dimana dalam hal ini perusahaan tersebut merupakan milik negara maka akan meningkatkan probabilitas terjadinya skandal dalam manajemen perusahaan tersebut sebesar 2,3089.

$$\begin{aligned} \text{REST} = & -3,3382 - 0.2305 \text{ POLICON} + 0.0950 \text{ ROA} - 0.0013 \text{ BTM} + \\ & 0.0838 \text{ FMSIZE} + 0,4895 \text{ S1} - 0.4258 \text{ S2} - 0,0822 \text{ S3} - 1.4172 \text{ S4} \\ & - 0,2640 \text{ S5} - 0.1479 \text{ S6} - 0,2861 \text{ S7} - 0.5632 \text{ S8} + 0,7924 \text{ Y1} \end{aligned}$$

Pada uji dengan *variable restatement*, perusahaan yang berada pada tahun 2017 yang dijadikan sebagai variabel kontrol penelitian (Y1) memiliki korelasi dengan restatement. Artinya adalah perusahaan-perusahaan sampel yang berada pada tahun 2017 akan menambah peluang terdapatnya skandal manajemen sebanyak 79.24%, *ceteris paribus*. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor lain selain kecurangan yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan restatement (PSAK No. 25).

IV.3. Pembahasan

Penelitian dilakukan untuk menguji variabel independen yaitu koneksi politik serta variabel kontrol yaitu pengembalian aset (ROA), *book-to-market*, dan juga ukuran perusahaan terhadap manajemen skandal. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta dimana perusahaan-perusahaan tersebut mewakili setiap sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2018.

Penelitian ini juga menggunakan sampel sebanyak 100 entitas ditahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian dilakukan olah data terhadap sampel tersebut untuk

mendapatkan sejumlah informasi yang memiliki keterkaitan dengan manajemen skandal yaitu informasi terkait skandal perusahaan, penyajian ulang laporan keuangan, hubungan politik, dan informasi keuangan untuk menghitung kinerja perusahaan berupa *return on asset*, perhitungan nilai buku per lembar saham serta ukuran perusahaan. Manajemen skandal dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh hubungan politik, *return on asset*, *book-to-market*, dan ukuran perusahaan sebesar 27,61% sedangkan 72,39% yang merupakan sisanya dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Lestari et al. (2019) mengungkapkan bahwa pada dasarnya koneksi perusahaan secara politik seharusnya berdampak positif untuk citra dan kemajuan perusahaan tetapi pada kenyataannya seringkali dijadikan alat untuk mendukung perilaku dalam melakukan kecurangan pelaporan keuangan sehingga terjadi skandal dalam manajemen perusahaan. Badan usaha yang terkoneksi politik juga akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan perusahaan yang tidak terkoneksi tersebut (Chaney et al., 2011). Kemudian Fadila et al., (2017) menjabarkan bahwa bentuk perlakuan berbeda yang dimaksudkan adalah perlakuan yang bersifat menguntungkan, seperti mudahnya proses peminjaman yang dilakukan perusahaan yang terkoneksi politik, rendah risiko pemeriksaan pajak. Oleh karena keuntungan-keuntungan tersebut pihak manajemen tidak memberikan perhatian yang lebih mengenai kualitas dari pelaporan keuangannya karena pada akhirnya perusahaan terkoneksi yang mengalami kualitas laba rendah akan memanfaatkan hubungan politik tersebut untuk mendapatkan perlindungan (Nugrahanti & Puspitasari, 2016). Maka pada akhirnya kemampuan perusahaan dalam bidang keuangan perusahaan yang terkoneksi secara politik tidak lebih baik dibandingkan badan usaha yang tidak memiliki koneksi tersebut (Faccio et al., 2006).

Dalam PSAK No. 25 diungkapkan kategori alasan terjadinya pelaporan keuangan yang disajikan kembali menjadi tiga kategori, antara lain berubahnya estimasi/perkiraan akuntansi, kesalahan dasar serta perubahan dalam kebijakan akuntansi. Dalam PSAK tersebut tidak hanya bentuk kecurangan yang menjadi penyebab terjadinya penyajian ulang laporan keuangan sehingga tidak bisa dikatakan

bahwa koneksi secara politik dapat langsung memberikan dampak secara langsung terhadap manajemen skandal. Apriyani et al., (2019) juga menjelaskan tidak ada hubungan diantara koneksi politik dan *earning management* yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penyajian ulang pelaporan keuangan suatu badan usaha.

Penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berhubungan positif terhadap manajemen skandal dengan proksi skandal perusahaan yang beredar di media dan tidak memiliki hubungan terhadap penyajian ulang laporan keuangan. Hal tersebut di buktikan dari koefisien untuk variabel POLICON terhadap skandal bernilai positif dan memiliki hasil yang besar, sedangkan untuk variabel POLICON terhadap *restatement* menunjukkan angka negatif. Dan untuk variabel lain mencatatkan angka negatif yang berarti tidak adanya hubungan dengan manajemen skandal.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Skandal Manajemen

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *political connection* (koneksi politik) berpengaruh positif terhadap manajemen skandal dengan proksi skandal akan tetapi tidak berpengaruh terhadap manajemen skandal dengan proksi penyajian ulang laporan keuangan (*restatement*). Hal tersebut memiliki arti bahwasanya koneksi secara politik yang ada dalam sebuah badan usaha dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kemungkinan terjadinya skandal manajemen pada perusahaan. Peningkatan tersebut terjadi karena badan usaha yang terkoneksi secara politik tersebut memiliki mutu manajemen yang lebih rendah (Faccio et al., 2006).

Data statistik menunjukkan bahwa koneksi politik yang terdapat dalam perusahaan tersebut diberikan nilai satu (1) salah satunya adalah perusahaan ADHI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadinya skandal pada perusahaan tersebut, diduga terjadi tindak korupsi yang dilakukan PT. Adhi Karya (Persero) dalam transaksi jual-beli tanah milik negara yang terdapat di Bekasi, tepatnya di Kalimalang Raya kepada seorang pengusaha. Terjadi juga skandal dalam manajemen pada perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik yang diberikan nilai nol (0), salah satunya adalah perusahaan LPCK pada tahun 2018 melakukan skandal manajemen berupa dugaan korupsi korporasi.

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sedangkan data statistik *restatement* memberikan informasi mengenai perusahaan yang memiliki hubungan/koneksi politik diberikan nilai satu (1) salah satunya adalah perusahaan BBNI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi *restatement* pada perusahaan milik negara itu. Begitupula dengan perusahaan yang bernilai nol (0) yaitu perusahaan TCID pada tahun 2018, perusahaan yang tidak mempunyai hubungan/koneksi secara politik tersebut menyajikan kembali penyajian laporan keuangan perusahaannya juga pada tahun 2018.

Adanya perbedaan hasil pengujian dengan peneliti terdahulu diduga karena jumlah perusahaan yang terhubung politik hanya lah sedikit yaitu sekitar 20 dari 50 perusahaan (Nugrahanti & Puspitasari, 2016). Tindakan perusahaan dalam melakukan pelaporan kembali laporan keuangannya merupakan salah satu indikasi terdapatnya tujuan manipulasi angka dalam laporan tersebut yang dapat mempengaruhi keaslian dari laporan tersebut serta menyesatkan pihak yang berkepentingan salah dalam mengambil keputusan ekonomi (Nuryani, 2012). Sedangkan penelitian ini menyatakan hal yang bertentangan, yaitu penyajian ulang pelaporan keuangan tidak mengindikasikan adanya manipulasi yang mengakibatkan skandal pada perusahaan tersebut.

Siregar & Rahay (2018) menjelaskan bahwa badan usaha menyajikan kembali pelaporan keuangannya berarti manajemen perusahaan buruk dan akan berpengaruh terhadap pemberian nilai oleh penanam modal untuk perusahaan. Oleh sebab itu ketika perusahaan berhubungan secara politik terhadap suatu pihak maka perusahaan tersebut berusaha menjaga hak-hak istimewa dengan tidak menampilkan sesuatu yang membuat investor tersebut menilai buruk perusahaan, salah satunya adalah menghindari terjadinya penyajian ulang laporan keuangan (Braam et al., 2015).

Tidak berpengaruhnya koneksi politik dengan *restatement* didukung pula oleh beberapa data perusahaan sampel. Perusahaan Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tahun 2017 dan 2018 yang merupakan perusahaan terkoneksi politik, dalam hal ini perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara, tidak melakukan penyajian ulang laporan keuangan. Walaupun pada tahun 2017 perusahaan tersebut mengalami skandal yang tersebar di media. Begitu pula dengan entitas bisnis yang tidak memiliki hubungan secara politik, contohnya adalah pada 2017 XL Axiata Tbk tidak menyajikan

ulang laporan keuangannya walaupun memiliki skandal perusahaan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap pegawainya.

Data *restatement* tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki skandal perusahaan tidak berarti bahwa perusahaan tersebut melakukan penyajian ulang pelaporan keuangan. Apriyani et al. (2019) juga menjelaskan bahwa tidak adanya hubungan antara koneksi politik terhadap salah satu tindak curang terhadap pelaporan keuangan yang menyebabkan terjadinya penyajian ulang pelaporan keuangan berupa *earnings management*. Pernyataan tersebut juga didukung PSAK No. 25 yang mengungkapkan kategori alasan terjadinya pelaporan keuangan yang disajikan kembali menjadi tiga kategori, antara lain berubahnya perkiraan/estimasi akuntansi, salah yang mendasar, serta berubahnya kebijakan dalam akuntansi. PSAK tersebut mengungkapkan tidak hanya bentuk kecurangan yang menjadi penyebab terjadinya penyajian ulang laporan keuangan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa koneksi secara politik tidak memberikan dampak secara langsung terhadap *restatement*.

Penelitian ini mencoba mengakomodir permasalahan manajemen skandal dengan menambah pengukuran terhadap manajemen skandal tersebut. Pengukuran tambahan yang dilakukan adalah dengan skandal perusahaan yang terdapat pada media (Julekhah & Rahmawati, 2019). Peneliti menambahkan kembali data berupa skandal yang terjadi pada perusahaan sampel yang mengalami skandal pada setiap tahun data tersebut. Kemudian melakukan pengujian terhadap keterkaitannya dengan koneksi politik.

Dalam hal keterjadian skandal tersebut, Putri V.R. (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam dunia usaha perlu mendapat persetujuan dari pemerintah terlebih dahulu untuk dapat melakukan kegiatan di pasar dan pemerintah memerlukan badan usaha tersebut untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui BUMN sehingga pemerintah memiliki kepentingan sebagai pelaksana yaitu meningkatkan pendapatan Negara dan berperan sebagai pemilik perusahaan yang membuat BUMN terhindar dari skandal. Disatu sisi pemerintah berkepentingan sebagai pelaksana, disisi lain juga berkepentingan sebagai pemilik perusahaan yang berkepentingan terhadap peningkatan kualitas manajemen dan terhadap investasi yang harus dilakukannya pengembalian. Saling keterkaitan tersebut sejalan dengan teori *stewardship* oleh

Donaldson & Davis (1991), yang menyatakan seharusnya dengan peran tersebut membuat entitas bisnis yang berhubungan secara politik maka manajemennya unggul dibandingkan entitas bisnis lainnya karena pihak manajemen seharusnya bekerja atas dasar target dan tujuan perusahaan dengan pemanfaatan yang baik atas peran tersebut dan mereka tidak akan meninggalkan institusinya karena mereka berupaya menggapai tujuan utama organisasinya. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yaitu Wirawan & Diyanty, (2014) yang mengatakan hubungan/koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penerapan *good corporate governance* yang artinya perusahaan dengan koneksi politik belum tentu tidak menerapkan *good corporate governance* (GCG) yang baik.

Dalam penelitiannya, Matangkin et al., (2018) menyatakan pendapat yang berbeda yaitu dengan kekuasaan yang dimiliki, terdapat kecenderungan para politisi atau pemilik entitas bisnis yang memiliki hubungan politik akan menikmati posisi pada perusahaan milik negara secara mayoritas dan dapat menyebabkan dua peluang yaitu perbedaan kepentingan antara sumber daya dan perusahaan serta tidak kompetennya sumber daya tersebut. Banyaknya pimpinan BUMN yang ditunjuk berdasarkan kedekatan politik tersebut juga dapat menyebabkan pimpinan tersebut tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam hubungan tersebut (Andrés et al., 2011 dan Faccio et al., 2006). Hal ini dilihat dari seringnya terjadi pergantian direksi BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN pada 2019 hingga 2020 dan masih terus berjalan, karena *key performance indicator* (KPI) tidak tercapai dan pengurus perusahaan itu menyalahi tata kelola perusahaan yang baik (www.economy.okezone.com).

Pemilihan berdasarkan koneksi politik tersebut juga menyebabkan pengawasan lembaga-lembaga pengawas akan melemah dan pengendalian tidak dapat berjalan optimal bila berkaitan dengan BUMN (Agrawal & Knoeber, 2001 dan Wang et al., 2017). Keuntungan lain adalah keuntungan berupa perlakuan khusus seperti mudahnya entitas bisnis tersebut untuk mendapatkan perijinan utang, rendah risiko pemeriksaan pajak (Fadila et al., 2017). Salah satu hal yang perlu diingat dengan kemudahan memperoleh hutang adalah adanya kemungkinan semakin banyaknya hutang

perusahaan akan meningkatkan *financial distress* perusahaan tersebut (Ilman et al., 2011). Contohnya adalah skandal yang ada di Indonesia yang salah satunya adalah tindak korupsi oleh Dirut Garuda Indonesia pada 2018 yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menerima suap senilai 2M USD dari perusahaan asal Inggris agar menjadi penyedia mesin bagi Garuda. Kemudian juga terjadi juga pada BUMN PT. Kertas Leces yang memiliki skandal pada tahun 2018. PT Kertas Leces tersebut dinyatakan pailit sejak 25 September 2018. Perusahaan dikatakan menunggak gaji karyawan sebanyak 1900 orang yang bernilai lebih dari Rp.300 M dan secara keseluruhan tagihan perusahaan yang mencakup hutang pajak, tunggakan gaji, dan lainnya adalah sekitar Rp.2,1 Triliun. Contoh lain di luar negeri adalah skandal yang terjadi pada perusahaan milik negara di Australia (Muhammad Iqbal & Murtanto, 2016). Kasus tersebut terjadi pada perusahaan *National Australia Bank* yang terjadi akibat menyembunyikan kerugian dalam hal pertukaran valuta asing dari kegiatan jual-beli yang salah dan penyelewengan terhadap sistem yang tidak dapat dibaca oleh pemeriksa/auditor dari luar perusahaan dan berdampak terhadap pelaporan keuangan yang tidak tepat.

Kemudian pada 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini adalah Erick Thohir juga mengatakan bahwa masih adanya direksi BUMN yang tidak kompeten salah satunya adalah tidak mengerti mengenai laporan keuangan yang menyebabkan beliau melakukan pergantian sumber daya dan melakukan pelatihan-pelatihan (www.liputan6.com). Hal lain yang menyebabkan skandal pada perusahaan yang terkoneksi politik adalah adanya kepentingan yang berbeda antara sumber daya dan perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengungkapkan mengenai entitas bisnis yang memiliki hubungan/koneksi secara politik tidak selamanya mengandung *restatement*, akan tetapi memiliki resiko terjadinya manajemen skandal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta, salah satu penyebabnya adalah karena pemilihan sumber daya yang berbeda antara BUMN dan swasta. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *restatement* yang menyebabkan skandal, karena perusahaan yang memiliki koneksi politik yang dalam hal ini merupakan entitas bisnis milik

pemerintah berusaha menjaga hak-hak istimewanya, salah satunya dengan tidak melakukan penyajian ulang pelaporan keuangan. Penyajian ulang tersebut merupakan hal yang dilakukan secara sengaja oleh entitas baik karena perubahan peraturan ataupun hal lain, sedangkan skandal bisa saja terjadi tanpa direncanakan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perusahaan yang mengalami skandal belum tentu akan melakukan penyajian laporan keuangan. Hal tersebut selaras dengan temuan Apriyani et al., (2019) dan Putra et al., (2018) yang mengungkapkan mengenai ketiadaan kaitan antara *political connection* dengan manajemen laba sebagai penyebab terjadinya *restatement*.

Akan tetapi, koneksi politik memiliki pengaruh terjadinya manajemen skandal, salah satunya adalah karena entitas bisnis swasta memiliki mekanisme yang lebih selektif dalam pemilihan sumber daya melalui tidak adanya kelompok koalisi politik seperti yang ada pada BUMN yang pada akhirnya akan mempermudah perusahaan dalam mengendalikan pegawainya serta terhindar dari campur tangan pihak pemerintah dalam penetapan strategi perusahaannya sehingga perusahaan lebih fokus dalam mengembangkan perusahaannya (Fadhly, 2019). Pada BUMN pemilihan direksi yang dimaksud adalah berdasarkan kedekatan politik karena pengangkatannya dilakukan berlandaskan keputusan Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2015 sehingga timbul banyak kepentingan-kepentingan tersembunyi dan saling berlawanan. Oleh karena itu, mengakibatkan pimpinan tersebut tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan dan menimbulkan skandal yang muncul ke permukaan media. Hasil penelitian ini merupakan hasil dari kalkulasi statistik peneliti terhadap sampel yang dikumpulkan dan hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan Vidiyanna Rizal Putri (2019), Faccio et al., (2006), Chaney et al., (2011), dan Wang et al., (2017) bahwa *political connection* (koneksi politik) berpengaruh terhadap manajemen skandal yang menyebabkan terjadinya skandal perusahaan yang ada pada media.